

Ringkasan Eksekutif

INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2024

27 MEI 2025

1. TENTANG IKT 2024

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2024 merupakan publikasi ke-8 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

2. METODOLOGI

Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial.

SETARA Institute dalam studi ini menurunkan konsep toleransi ke dalam beberapa variabel sistemik kota yang dapat memengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga, yakni: (1) kebijakan-kebijakan pemerintah kota, (2) tindakan-tindakan aparaturnya pemerintah kota, (3) perilaku antar entitas di kota termasuk warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan (4) relasi-relasi sosial dalam heterogenitas demografis warga kota.

IKT mengadopsi kerangka Brian J. Grim dan Roger Finke (2006), yaitu kerangka pengukuran tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi sebuah negara. Dalam kerangka ini, Grim dan Finke

menyusun 3 indikator utama untuk mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat toleransi, yakni: (1) Favoritisme atau pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu; (2) Peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, dan (3) Regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama.

SETARA Institute, dengan mempertimbangkan kekhasan Indonesia, memodifikasi kerangka Grim dan Finke dengan tambahan variabel, yakni demografi sosio-keagamaan. Komposisi penduduk dipandang sebagai salah satu parameter dalam mengukur pengelolaan toleransi dan kerukunan di kota. Heterogenitas atau homogenitas latar keagamaan sebuah kota diasumsikan dapat memengaruhi kualitas (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) kota DKI Jakarta. Penggabungan ini dilakukan karena secara administratif dan legal, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah.

Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka *indexing*, studi IKT menetapkan 4 (empat) variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur, yakni:

a. **Regulasi Pemerintah Kota**

- Indikator 1: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya
- Indikator 2: Kebijakan pemerintah kota meliputi kebijakan promotif dan diskriminatif terkait isu toleransi

b. **Regulasi Sosial**

- Indikator 3: Peristiwa intoleransi
- Indikator 4: Dinamika masyarakat sipil terkait

isu toleransi

c. **Tindakan Pemerintah**

- Indikator 5: Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi
- Indikator 6: Tindakan nyata terkait isu toleransi

d. **Demografi Sosio-Keagamaan**

- Indikator 7: Heterogenitas keagamaan penduduk
- Indikator 8: Inklusi sosial keagamaan

Pengembangan indikator penelitian dilakukan pada IKT 2024, tepatnya melalui pengembangan indikator ke-2 dari semula hanya mengukur ada atau tidaknya di suatu daerah kebijakan diskriminatif, dikembangkan menjadi kebijakan pemerintah dengan sub-indikator kebijakan diskriminatif dan kebijakan promotif terhadap toleransi. Pengembangan ini untuk terus mengokohkan ekosistem toleransi di daerah melalui legitimasi produk hukum di daerah, serta bentuk komitmen kepemimpinan politik dan birokrasi dalam membangun kota yang toleran.

Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih. Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner self- assessment kepada seluruh pemerintah kota.

Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator. Kombinasi pembobotan dalam setiap indikator menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (10%)
2. Kebijakan Pemerintah Kota (20%)

- 3. Peristiwa Intoleransi (20%)
- 4. Dinamika Masyarakat Sipil (10%)
- 5. Pernyataan Publik Pemerintah Kota (10%)
- 6. Tindakan Nyata Pemerintah Kota (15%)
- 7. Heterogenitas Agama (5%)
- 8. Inklusi Sosial Keagamaan (10%)

Rata-rata hasil dari kombinasi pembobotan diukur ke dalam skema skoring. Dalam studi ini, skoring menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas rendah ke tinggi, dengan nilai (1) untuk kualitas rendah dan (7) untuk kualitas tertinggi. Selain itu, untuk menjamin validitas data hasil skoring, SETARA Institute melakukan tiga teknik uji validitas sekaligus, yakni (1) triangulasi sumber, (2) kuesioner *self-assessment*, dan (3) *expert meeting series* atau pertemuan serial para ahli.

3. TEMUAN PENELITIAN IKT 2024

Studi Indeks Kota Toleran 2024 telah menghasilkan rangking 94 kota di Indonesia dari kota dengan skor toleransi tertinggi hingga terendah [*lampiran*]. Rangking 94 kota tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai berikut:

3.1. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERTINGGI

Peringkat 10 kota dengan skor toleransi tertinggi IKT 2024 secara umum masih ditempati kota-kota yang sama dengan IKT 2024, meskipun terjadi dinamika perubahan posisi di dalamnya. Kokohnya kota-kota tersebut dalam 10 peringkat teratas semakin menegaskan terjaga dan terus bersinerginya elemen-

elemen kota dalam menjaga ekosistem toleransi, serta kinerja 3 (tiga) jenis kepemimpinan yang semakin promotif, yakni **kepemimpinan kemasyarakatan** (*societal leadership*), **kepemimpinan politik** (*political leadership*) dan **kepemimpinan birokrasi** (*bureaucratic leadership*).

Tabel 1
10 Kota Skor Toleransi Tertinggi

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
1	Salatiga	6,50	6,22	7,00	6,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,544
2	Singkawang	6,50	6,10	7,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,420
3	Semarang	6,00	6,03	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,356
4	Magelang	6,00	5,74	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,248
5	Pematang Siantar	5,17	5,74	7,00	4,00	7,00	7,00	6,00	6,00	6,115
6	Sukabumi	5,50	5,59	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,968
7	Bekasi	6,17	6,11	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	5,939
8	Kediri	5,83	5,71	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,925
9	Manado	6,00	5,56	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,912
10	Kupang	5,33	5,35	7,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,853

Dinamika peringkat kota-kota tersebut memperlihatkan berbagai inovasi yang terus ditunjukkan kota-kota dalam menguatkan ekosistem toleransi di wilayahnya. Kondisi tersebut di antaranya terlihat dengan adanya peringkat 1 (satu) baru sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024. Jika pada IKT 2023 dan sebelumnya, peringkat 1 diduduki Kota Singkawang, maka pada tahun 2024 diduduki Kota Salatiga dengan skor 6,544. Kota Salatiga naik 2 (dua) peringkat setelah sebelumnya pada IKT 2023 menempati peringkat ke-3 (tiga).

Pada tahun 2024, Kota Salatiga melakukan inovasi progresif dalam pemajuan toleransi. Inovasi tersebut berupa produk hukum promotif terhadap toleransi, yakni Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial. Melalui inovasi ini juga, Kota Salatiga menjadi satu dari tiga kota di Indonesia selain Kota Banjarmasin dan Kota Mojokerto yang memiliki produk hukum promotif toleransi pada tingkat Perda sebagai peraturan perundang-undangan dengan hirarki tertinggi pada level pemerintahan daerah.

Peraturan promotif toleransi, terutama berkaitan dengan kebangsaan, pada tingkat Perda juga diterbitkan pemerintah Kota Salatiga di tahun 2024. Peraturan tersebut berupa Perda No. 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Melalui dua Perda ini, Kota Salatiga terlihat

melipatgandakan penguatan ekosistem toleransinya sekaligus mengartikulasikan narasi toleransi dan kebangsaan yang dikokohkan secara legal formil.

Dinamika lainnya terlihat melalui Kota Pematang Siantar sebagai satu-satunya pembeda dalam susunan peringkat 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024. Kota Pematangsiantar naik dari peringkat 11 pada IKT 2023 menjadi peringkat 5 pada IKT 2024 dengan skor 6,115. Kenaikan peringkat ini ditopang kepemimpinan politik (*political leadership*) yang sangat promotif terhadap pembentukan ekosistem toleransi di Pematangsiantar. Kepemimpinan politik tersebut menggerakkan kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan kemasyarakatan di Pematang Siantar untuk menggelorakan serta memastikan agenda pemajuan toleransi terus berkembang.

Komitmen tersebut semakin diperkuat pada tahun 2024 dengan lahirnya produk hukum lainnya yang promotif terhadap pemajuan toleransi, dalam hal ini spesifik berkaitan dengan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Melalui produk hukum tersebut, pemerintah kota Pematangsiantar telah memiliki tim terpadu maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2024.

3.2. KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI TERENDAH

Dinamika kota terjadi lebih massif pada peringkat 10 kota dengan skor toleransi terendah pada IKT 2024. Meskipun secara umum masih ditempati kota-kota yang sama dengan IKT 2023, namun terdapat sejumlah kota pendatang baru pada zona ini, sebagai berikut:

Tabel 2
10 Kota dengan Skor Toleransi Terendah IKT 2024

Rangking	Kota	Ind 1	Ind 2	Ind 3	Ind 4	Ind 5	Ind 6	Ind 7	Ind 8	Skor Akhir
85	Pagar Alam	3,33	4,99	7,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,381
86	Sabang	3,67	4,30	7,00	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,377
87	Ternate	5,00	4,85	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,370
88	Makassar	5,17	5,48	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,363
89	Bandar Lampung	3,17	5,45	6,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,357
90	Pekanbaru	3,50	4,85	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,320
91	Banda Aceh	3,50	3,76	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,202
92	Lhokseumawe	3,50	3,70	6,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,140
93	Cilegon	3,50	3,97	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,994
94	Pare Pare	4,33	5,06	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,945

Perlu digarisbawahi bahwa dalam studi ini, suatu kota mendapatkan skor terendah bukan hanya disebabkan terjadinya peristiwa intoleran ataupun hal-hal lainnya yang destruktif terhadap toleransi, tetapi juga disebabkan ketiadaan fokus dan inovasi terhadap pemajuan toleransi di kotanya, sementara kota-kota telah bergegas dalam melakukan berbagai inovasi maupun terobosan dalam pemajuan toleransi.

Kondisi demikian terlihat melalui kondisi di Kota Pagar Alam dan Sabang. Pada studi-studi IKT tahun sebelumnya, kondisi serupa juga terjadi mengingat

pada IKT 2023 kota tersebut masing-masing menempati peringkat 81 dan 85. Meskipun di kota-kota tersebut studi ini mencatatkan nihil kebijakan diskriminatif maupun peristiwa intoleran, akan tetapi berbagai komponen dalam ekosistem toleransi belum terbentuk, seperti visi toleransi dalam pembangunan, kebijakan promotif toleransi, maupun berbagai tindakan pemerintah dan masyarakat. Kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, maupun kepemimpinan kemasyarakatan di kota tersebut juga belum memperlihatkan kinerja nyata dan kolaboratif dalam pemajuan toleransi.

Hal lain yang perlu mendapat sorotan berupa keberadaan sejumlah kota yang konsisten sama dari tahun-tahun sebelumnya pada peringkat 10 skor terendah, termasuk tahun 2023, seperti Cilegon, Banda Aceh, Pekanbaru, dan Lhokseumawe. Meskipun kondisi pemajuan toleransi di kota-kota ini stagnan dan mendapat berbagai sorotan publik, hal tersebut nyatanya belum mampu secara memadai mendorong adanya inovasi maupun terobosan pemajuan toleransi, baik berbasis kebijakan, program, maupun ruang-ruang perjumpaan lintas agama. Meskipun terus diupayakan dan sudah lama memiliki ruang-ruang komunikasi dialogis yang baik antar agama dan etnis, tetapi nyatanya terhambat oleh kebijakan pemerintah kota.

Berlarut-larutnya regresi toleransi di kota-kota pada rumpun peringkat ini, berpotensi terus menjadi lahan tumbuh subur nya persoalan-persoalan intoleransi ke depannya, baik oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Namun demikian, kota yang tidak punya dan atau minim visi toleransi tersebut, bukan berarti kota yang tidak bisa berubah. Meskipun perubahan itu hanya mungkin terjadi bila ada keberanian dari kepemimpinan politik, dukungan kepemimpinan birokrasi, serta partisipasi kepemimpinan kemasyarakatan agar pemajuan toleransi dapat menjadi bagian integral dan prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

3.3. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 1: REGULASI PEMERINTAH

Selain memberikan skor akumulasi dari keseluruhan indikator sebagai basis perbandingan 94 kota, penelitian ini juga mengklasifikasikan skor berdasarkan variabel penelitian. Berdasarkan variabel Regulasi Pemerintah, dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi pada IKT 2024, yakni:

Tabel 3
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 1: Regulasi Pemerintah

Rangking IKT 2024	Kota	Ind 1	Ind 2	Skor	Rangking Variabel
1	Salatiga	6,50	6,22	6,36	1
2	Singkawang	6,50	6,10	6,30	2
7	Bekasi	6,17	6,11	6,14	3
3	Semarang	6,00	6,03	6,02	4
4	Magelang	6,00	5,74	5,87	5
12	Surakarta	5,83	5,80	5,82	6
9	Manado	6,00	5,56	5,78	7
8	Kediri	5,83	5,71	5,77	8
7	Sukabumi	5,50	5,59	5,55	9
18	Mojokerto	4,67	6,32	5,50	10

Secara prinsip, setiap rencana pembangunan yang baik semestinya memiliki satu prinsip utama: bahwa semua warga, tanpa kecuali, memiliki tempat yang aman, setara, dan bermartabat dalam kehidupan bersama. Pengarusutamaan prinsip ini untuk menegaskan tidak ada warga negara kelas dua, terutama jika dilandaskan latar belakang berbasis suku, ras, maupun agama.

Poin penting yang dapat digarisbawahi dalam paradigma IKT, khususnya dalam variabel ini adalah, toleransi bukan pelengkap dalam dokumen perencanaan pembangunan, tetapi pondasi moral dan strategis dari tata kota yang adil dan menjunjung tinggi kesetaraan setiap warga. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, pembangunan tanpa visi toleransi adalah jalan pintas menuju ketegangan sosial hingga favoritisme yang terus-menerus.

Dalam kerangka tersebut, komitmen kota-kota sebagaimana tabel 3 perlu mendapat perhatian. Delapan dari sepuluh kota dalam kategori ini masih diisi oleh

kota-kota yang masuk jajaran 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2024. Kondisi ini pada dasarnya telah memberi gambaran ekosistem toleransi yang kokoh tertanam di kota-kota tersebut.

Simpul-simpul toleransi di kota-kota tersebut disusun, umumnya, dengan dua basis. Pertama visi toleransi dalam desain rencana pembangunan (RPJMD). Visi toleransi tersebut diterjemahkan ke dalam program-program dan alokasi anggaran yang memadai dalam membentuk ekosistem toleransi pada tingkat lebih rinci. Basis ke-2 simpul-simpul tersebut berupa penerbitan berbagai produk hukum promotif toleransi, baik pada tingkat Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah. Produk hukum promotif toleransi tersebut bukan sekadar kebijakan normatif, tetapi juga menjadi perisai hukum dan arah kebijakan publik untuk memastikan bahwa perbedaan tidak lagi menjadi alasan perpecahan, tetapi sumber kekuatan bersama.

3.4. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 2: REGULASI SOSIAL

Berdasarkan variabel Regulasi Sosial, studi IKT 2024 menyusun 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 4
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 2: Regulasi Sosial

Rangking IKT 2024	Kota	Ind 3	Ind 4	Skor	Rangking Variabel
1	Salatiga	7,00	6,00	6,50	1
2	Singkawang	7,00	6,00	6,50	2
3	Semarang	7,00	6,00	6,50	3
4	Magelang	7,00	6,00	6,50	4
14	Bandung	5,50	7,00	6,20	5
7	Sukabumi	7,00	5,00	6,00	6
8	Kediri	7,00	5,00	6,00	7
10	Kupang	7,00	5,00	6,00	8

Rangking IKT 2024	Kota	Ind 3	Ind 4	Skor	Rangking Variabel
11	Ambon	7,00	5,00	6,00	9
13	Denpasar	7,00	5,00	6,00	10

Melalui variabel ini, baik peringkat kota-kota hingga skor-skor yang diberikan, terlihat bahwa ekosistem toleransi perlu terus diperkuat melalui berbagai sinergi dan kolaborasi lintas sektor, selain program-program pemajuan toleransi yang berkelanjutan. Meskipun tujuh dari sepuluh kota dengan skor toleransi tertinggi ada pada tabel 4, tetapi tidak masuknya tiga kota lainnya tersebut memperlihatkan dinamisnya upaya pemajuan toleransi di setiap kota. Selain terdapat kota-kota yang kuat dalam berbagai komponen dan ekosistem toleransi, juga terdapat kota-kota yang masih berupaya dalam pemerataan komponen tersebut.

Secara khusus, dampak keamanan ekosistem toleransi terlihat pada kota-kota yang membukukan prestasi dengan skor 7 pada indikator 3, artinya selama periode penelitian tidak ditemukan peristiwa intoleransi di kota-kota tersebut. Hal ini menjadi potret prestasi nyata, peristiwa intoleransi yang terjadi di sebuah kota bukan sekadar pelanggaran terhadap hak individu, tetapi lebih dari itu, merupakan retakan yang mengancam pondasi kesetaraan dan kehidupan bersama. Sebaliknya, kota-kota ini tidak hanya menolak peristiwa intoleransi, tapi berhasil membangun berbagai komponen yang membentuk suatu ekosistem toleransi.

3.5. SKOR TERTINGGI BERDASARKAN VARIABEL 3: TINDAKAN PEMERINTAH

Berdasarkan variabel Tindakan Pemerintah, pada IKT 2024 dihasilkan 10 (sepuluh) kota dengan skor tertinggi, yakni:

Tabel 5
10 Kota dengan Skor Tertinggi Variabel 3: Tindakan Pemerintah

Rangking IKT 2024	Kota	Ind 5	Ind 6	Skor	Rangking Variabel
1	Salatiga	7,00	7,00	7,00	1
5	Pematangsiantar	7,00	7,00	7,00	3
7	Bekasi	7,00	7,00	7,00	2
3	Semarang	6,00	7,00	6,50	5
15	Banjarmasin	6,00	7,00	6,50	9
2	Singkawang	6,00	6,00	6,00	4
4	Magelang	6,00	6,00	6,00	6
7	Sukabumi	6,00	6,00	6,00	7
9	Manado	6,00	6,00	6,00	8
20	Surabaya	6,00	6,00	6,00	10

Pemerintah kota menjadi wajah negara yang paling dekat dengan warga. Di tangannya, implementasi dan nilai-nilai Konstitusi harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, kesetaraan hak, dan perlindungan minoritas. Oleh karena itu, komitmen terhadap toleransi tidak bisa hanya berhenti sebagai retorika dalam sambutan-sambutan seremonial. Tetapi harus hadir dalam secara sistemik dan struktural, mulai dari perencanaan pembangunan, regulasi, program, hingga tindakan di lapangan.

Dalam kerangka itu, kinerja kota-kota dalam variabel ini menjadi penting disoroti. Secara umum, kota-kota dalam kategori ini diisi oleh kota-kota yang masuk dalam 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi. Kondisi ini mengonfirmasi dan memvalidasi kinerja pemerintah kota dalam pemajuan toleransi, serta menunjukkan kinerja kepemimpinan toleran yang sinergis dan kuat antara kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) dalam mendorong pemajuan toleransi melalui jalur struktural.

3.6. KOTA DENGAN PENINGKATAN RANGKING TERTINGGI PADA IKT 2024

Dinamika pemajuan toleransi pada 94 kota di Indonesia, yang dipotret melalui IKT merekam dampak dan perubahan pada munculnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan elemen kota untuk berbenah. IKT telah menggerakkan kota-kota untuk berkompetisi di jalan pemajuan toleransi dengan memenuhi standar-standar yang ditetapkan dalam IKT.

Kondisi tersebut berdampak signifikan pada terbentuknya ekosistem toleransi yang terus membaik, serta menular ke kota-kota lainnya. Bahkan terdapat kota-kota yang mendapatkan kenaikan peringkat signifikan karena terobosan progresif yang dilakukan. Melalui studi ini, dihasilkan 10 (Sepuluh) kota dengan peningkatan rangking tertinggi, yakni:

Tabel 6
10 Kota dengan Peningkatan Rangking Tertinggi

No	Kota	Rangking IKT 2023	Rangking IKT 2024	Peningkatan Rangking
1	Tidore Kepulauan	77	25	52
2	Palembang	87	53	34
3	DKI Jakarta	68	41	27
4	Medan	73	47	26

No	Kota	Rangking IKT 2023	Rangking IKT 2024	Peningkatan Rangking
5	Jambi	60	36	24
6	Mojokerto	39	18	21
7	Padang	91	72	19
8	Mataram	89	70	19
9	Depok	94	78	16
10	Denpasar	26	13	13

Kinerja kota-kota ini menjadi angin segar dalam pemajuan toleransi di Indonesia. Bukan hanya kota-kota yang masuk 10 besar skor tertinggi, tetapi fenomena berbagai kota bergegas ke arah pembentukan ekosistem toleransi terjadi. Salah satunya Kota Tidore Kepulauan yang menempati peringkat 25 pada IKT 2024. Nihilnya peristiwa intoleran dan produk hukum diskriminatif telah menjadi modal awal dalam pemajuan toleransi di

kota ini. Kepemimpinan politik menjadi penopang pilar toleransi di kota ini, melalui berbagai pernyataan dan sikap Kepala Daerah yang promotif terhadap toleransi, bahkan di antaranya dengan pernyataan memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat di wilayahnya untuk menyelenggarakan kegiatan baik keagamaan maupun lainnya tanpa memandang identitas primordialnya.

3.7. KOTA DENGAN PERINGKAT TERTINGGI KATEGORI PENDUDUK DI ATAS 1 JUTA JIWA

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tata kelola toleransi dan kebinekaan di kota-kota dengan jumlah penduduk besar, SETARA Institute menyajikan perangkingan baru berdasarkan jumlah penduduk. Dalam kategori ini, peneliti SETARA Institute memilah 10 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa. Adapun 10 kota yang berhasil menduduki perangkingan teratas dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 sebagai berikut:

Tabel 7
10 Kota Skor Tertinggi dengan Penduduk Besar

No	Kota	Jumlah Penduduk	Rangking IKT 2024
1	Semarang	1.708.830 jiwa	3
2	Bekasi	2.627.210 jiwa	7
3	Bandung	2.579.837 jiwa	14
4	Bogor	1.137.018 jiwa	19

No	Kota	Jumlah Penduduk	Rangking IKT 2024
5	Surabaya	3.009.286 jiwa	20
6	DKI Jakarta	11.135.191 jiwa	41
7	Tangerang	1.965.000 jiwa	45
8	Medan	2.524.341 jiwa	47
9	Palembang	1.801.367 jiwa	53
10	Batam	1.294.548 jiwa	66

Keberadaan kota-kota sebagaimana tabel di atas, terutama kota-kota yang berada di 20 besar, yakni Semarang, Bekasi, Bandung, Bogor, dan Surabaya, memperlihatkan bahwa demografi penduduk yang besar bukan menjadi penghalang untuk membangun ekosistem toleransi yang kuat. Publik perlu menyadari bahwa menjaga toleransi di sebuah kota kecil adalah tantangan. Tapi menjaga toleransi di kota besar—dengan jutaan penduduk, arus kel luar-masuk masyarakat dalam bekerja yang padat, dan kompleksitas identitas yang berlapis—adalah sebuah prestasi.

4. TREN DAN DINAMIKA TOLERANSI KOTA 2024

SETARA Institute melakukan penghitungan kumulatif untuk mendapatkan skor rata-rata nasional pada Indeks Kota Toleran. Dalam 8 kali studi, termasuk IKT 2024, studi ini telah menghasilkan rata-rata nasional sebagai berikut

Grafik 1 di atas menggambarkan kondisi toleransi, sejak publikasi IKT pertama tahun 2015 berada di angka 4,75 dan angka tertinggi di tahun 2021 dengan skor 5,24. Sementara rata-rata nasional pada tahun 2024 adalah nilai 4,92. Rata-rata ini mengalami penurunan 0,14 dari skor rata-rata nasional tahun 2023 yang memiliki skor 5,06. Angka 4,92 untuk rata-rata nasional dari skala 1-7 menunjukkan bahwa toleransi di Indonesia cukup baik dan menunjukkan status *improving* berkelanjutan.

Penurunan skor ini secara umum disebabkan faktor

metodologis, mengingat IKT 2024 melakukan pengembangan indikator sebagai upaya pengokohan ekosistem toleransi, secara umum di Indonesia dan secara khusus di kota-kota. Indikator yang dikembangkan adalah indikator ke-2. Jika sebelumnya indikator 2 hanya mengukur ada atau tidaknya produk hukum diskriminatif, pada IKT 2024 terdapat integrasi keberadaan produk hukum promotif toleransi sebagai bagian dari penilaian studi ini. Dengan demikian, kota-kota yang memiliki produk hukum promotif terhadap toleransi akan memperoleh penilaian lebih, begitupun konsekuensi sebaliknya.

Pengembangan indikator ini menjadi bagian dari tren positif yang dipotret melalui temuan IKT 2023, yakni tumbuh suburnya produk hukum promotif toleransi di kota-kota. Ditemukan 61 produk hukum daerah

yang promotif toleransi dengan rincian 11 Peraturan Daerah, 16 Peraturan Walikota, dan 34 bentuk lainnya yang dapat meliputi Surat Edaran, Surat Keputusan, dan sebagainya. Pada tahun 2024, tren tersebut terus bersambung dengan terdeteksinya 11 produk hukum promotif toleransi. Kondisi ini memperlihatkan kepemimpinan politik (*political leadership*) dan kepemimpinan birokrasi (*bureaucratic leadership*) yang mapan dalam merawat dan mengembangkan ekosistem toleransi.

5. REKOMENDASI

1. Presiden perlu mengambil peran dalam memastikan universalitas dan linearitas upaya pemajuan toleransi, dari tingkat pusat hingga daerah, mengingat Visi Indonesia 2045 juga menempatkan toleransi menjadi prasyarat menuju Indonesia emas 2025 melalui Pilar 1 Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan produk hukum daerah yang diskriminatif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi landasan pacu tumbuh suburnya praktik intoleransi, baik dilakukan aktor negara maupun non-negara..
3. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendorong maupun memfasilitasi kolaborasi antar-kota/kabupaten dalam pemajuan toleransi melalui perencanaan pembangunan yang toleran-inklusif. Kebutuhan ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang menaruh perhatian pada aspek toleransi, kohesi sosial, inklusivitas, hingga kemajemukan.
4. Dalam kerangka Visi Indonesia 2045, perlu dilakukan penerjemahan rencana, kebijakan, dan program-program intervensi dalam merawat kerukunan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Dekonsentrasi, perlu didorong untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam orkestrasi pembangunan ekosistem toleransi.
5. Pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten memberikan dukungan anggaran memadai bagi FKUB dan bagi inisiatif-inisiatif pemajuan toleransi-inklusi di kota/kabupaten.
6. Mendorong kota-kota (dan kabupaten), baik antar pemerintah kota maupun elemen masyarakat sipil, untuk saling membangun kolaborasi dan gotong royong dalam rangka pemajuan toleransi. Hal tersebut selama ini terbukti berhasil dalam tular-menular pemajuan toleransi antar-kota.[]

Lampiran
**Skor Lengkap Kota-Kota
 Indeks Kota Toleran 2024**

No	KOTA	Regulasi Pemerintah			Regulasi Sosial			Tindakan Pemerintah			Demografi Agama			SKOR AKHIR		
		30%			30%			25%			15%					
		IND 1	IND 2	IND 3	IND 4	IND 5	IND 6	IND 7	IND 8	IND 9	IND 10	IND 11	IND 12			
1	Salatiga	6,50	6,22	1,244	7,00	1,400	6,00	0,600	7,00	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,544
2	Singkawang	6,50	6,10	1,220	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	6,00	0,900	7,00	0,350	7,00	0,700	6,420
3	Semarang	6,00	6,03	1,206	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	6,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,356
4	Magelang	6,00	5,74	1,148	7,00	1,400	6,00	0,600	6,00	6,00	0,900	6,00	0,300	7,00	0,700	6,248
5	Pematang Siantar	5,17	5,74	1,148	7,00	1,400	4,00	0,400	7,00	7,00	1,050	6,00	0,300	6,00	0,600	6,115
6	Sukabumi	5,50	5,59	1,118	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,968
7	Bekasi	6,17	6,11	1,222	4,00	0,800	6,00	0,600	7,00	7,00	1,050	7,00	0,350	6,00	0,600	5,939
8	Kediri	5,83	5,83	5,71	1,142	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,900	6,00	0,300	5,00	0,500	5,925
9	Manado	6,00	5,56	1,112	6,00	1,200	6,00	0,600	6,00	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,912
10	Kupang	5,33	5,35	1,070	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	6,00	0,900	5,00	0,250	6,00	0,600	5,853
11	Ambon	5,00	5,00	5,20	1,040	7,00	1,400	5,00	0,500	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,840
12	Surakarta	5,83	5,80	1,160	5,00	1,000	6,00	0,600	6,00	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,743
13	Denpasar	4,50	4,50	5,38	1,076	7,00	1,400	6,00	0,600	4,00	0,400	5,00	0,300	7,00	0,700	5,676
14	Bandung	5,17	4,68	0,936	5,50	1,100	7,00	0,700	6,00	6,00	0,900	6,00	0,300	6,00	0,600	5,653
15	Banjarmasin	4,83	4,83	5,57	1,114	5,50	1,100	6,00	0,600	6,00	1,050	4,00	0,200	5,00	0,500	5,647
16	Tomohon	5,00	5,00	5,20	1,040	7,00	1,400	4,00	0,400	6,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,440
17	Yogyakarta	5,00	5,00	5,44	1,088	6,00	1,200	5,00	0,500	5,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,438
18	Mojokerto	4,67	6,32	1,264	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	5,00	0,900	6,00	0,150	4,00	0,400	5,381
19	Bogor	5,33	5,33	5,17	1,034	5,00	1,000	6,00	0,600	5,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,317
20	Surabaya	5,33	5,05	1,010	5,00	1,000	5,00	0,500	6,00	6,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,293
21	Batu	5,50	5,39	1,078	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	5,00	0,750	4,00	0,200	5,00	0,500	5,278
22	Pontianak	4,33	5,09	1,018	7,00	1,400	5,00	0,500	5,00	5,00	0,750	5,00	0,250	4,00	0,400	5,251
23	Palangkaraya	4,50	5,11	1,022	6,00	1,200	4,00	0,400	5,00	5,00	0,900	5,00	0,250	5,00	0,500	5,222
24	Madiun	4,33	5,89	1,178	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,211
25	Tidore Kepulauan	4,17	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	5,00	0,900	3,00	0,150	5,00	0,500	5,207
26	Gimahi	4,67	5,89	1,178	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	4,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,195
27	Malang	4,83	4,97	0,994	7,00	1,400	5,00	0,500	4,00	4,00	0,750	3,00	0,150	5,00	0,500	5,177
28	Bitung	4,50	5,92	1,184	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	4,00	0,750	5,00	0,250	4,00	0,400	5,134
29	Pekalongan	4,00	4,00	5,44	1,088	7,00	1,400	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	5,038
30	Palu	4,33	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	4,973

No	KOTA	Regulasi Pemerintah			Regulasi Sosial			Tindakan Pemerintah			Demografi Agama			SKOR AKHIR				
		30%			30%			25%			15%							
		IND 1	10%	IND 2	20%	IND 3	20%	IND 4	10%	IND 5	10%	IND 6	15%		IND 7	5%	IND 8	10%
31	Tual	4,33	0,433	5,20	1,040	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,973
32	Cirebon	5,00	0,500	5,35	1,070	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	6,00	0,900	4,00	0,200	4,00	0,400	4,970
33	Tebing Tinggi	5,00	0,500	5,20	1,040	7,00	1,400	2,00	0,200	4,00	0,400	6,00	0,900	4,00	0,200	3,00	0,300	4,940
34	Jayapura	4,83	0,483	5,20	1,040	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	4,923
35	Probolinggo	5,00	0,500	5,24	1,048	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,898
36	Jambi	4,50	0,450	5,20	1,040	6,50	1,300	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	4,00	0,400	4,890
37	Tanjung Pinang	5,83	0,583	5,20	1,040	6,50	1,300	4,00	0,400	3,00	0,300	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	4,873
38	Pasuruan	3,50	0,350	5,09	1,018	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	6,00	0,900	2,00	0,100	4,00	0,400	4,868
39	Tegal	5,00	0,500	4,98	0,996	7,00	1,400	3,00	0,300	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,846
40	Pangkal Pinang	4,50	0,450	5,20	1,040	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,840
41	DKI Jakarta	5,50	0,550	5,20	1,040	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	4,840
42	Palopo	4,00	0,400	4,92	0,984	7,00	1,400	4,00	0,400	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	6,00	0,600	4,834
43	Padangsidempuan	3,50	0,350	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	4,790
44	Bontang	4,33	0,433	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,773
45	Tangerang	4,17	0,417	5,27	1,054	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,771
46	Banjarbaru	4,33	0,433	4,80	0,960	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	4,743
47	Medan	4,83	0,483	5,03	1,006	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	3,00	0,300	4,739
48	Blitar	4,17	0,417	5,07	1,014	6,00	1,200	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,731
49	Balikpapan	3,83	0,383	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	4,723
50	Tangerang Selatan	4,50	0,450	5,30	1,060	6,00	1,200	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,710
51	Kotamobagu	3,83	0,383	5,62	1,124	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,707
52	Bukittinggi	4,00	0,400	4,71	0,942	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,692
53	Palembang	4,50	0,450	4,88	0,976	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	4,676
54	Binjai	3,83	0,383	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,673
55	Tanjung Balai	3,83	0,383	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,673
56	Tasikmalaya	5,00	0,500	4,58	0,916	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	4,666
57	Kendari	3,67	0,367	5,20	1,040	7,00	1,400	4,00	0,400	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,657
58	Sorong	4,33	0,433	5,09	1,018	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,651
59	Subulussalam	3,00	0,300	4,30	0,860	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,610
60	Bengkulu	4,33	0,433	5,10	1,020	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,603
61	Sawahlunto	4,00	0,400	4,71	0,942	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,592
62	Bau Bau	3,00	0,300	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,590
63	Samarinda	4,00	0,400	5,20	1,040	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	3,00	0,300	4,590
64	Prabumulih	3,00	0,300	4,92	0,984	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	4,584
65	Banjarnegara	3,83	0,383	5,24	1,048	7,00	1,400	2,00	0,200	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,581
66	Batam	4,00	0,400	4,90	0,980	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	3,00	0,450	5,00	0,250	4,00	0,400	4,580
67	Serang	4,00	0,400	4,57	0,914	6,00	1,200	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,564
68	Tarakan	4,17	0,417	5,20	1,040	6,00	1,200	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,557
69	Dumai	4,00	0,400	5,45	1,090	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	4,00	0,200	4,00	0,400	4,540
70	Mataram	4,00	0,400	4,78	0,956	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,506

No	KOTA	Regulasi Pemerintah			Regulasi Sosial			Tindakan Pemerintah			Demografi Agama			SKOR AKHIR				
		30%			30%			25%			15%							
		IND 1	IND 2	20%	IND 3	IND 4	10%	IND 5	IND 6	15%	IND 7	5%	IND 8		10%			
71	Padang Panjang	3,67	0,367	4,66	0,932	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	4,499
72	Padang	4,17	0,417	4,14	0,828	6,00	1,200	5,00	0,500	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,150	4,00	0,400	4,495
73	Solok	4,50	0,450	4,67	0,934	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,484
74	Payakumbuh	3,83	0,383	5,00	1,000	5,00	1,000	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,750	5,00	0,150	4,00	0,400	4,483
75	Gunung sitoli	3,83	0,383	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,200	4,00	0,400	4,473
76	Pariaman	3,00	0,300	5,11	1,022	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,150	3,00	0,300	4,472
77	Lubuk Linggau	4,17	0,417	5,21	1,042	6,00	1,200	4,00	0,400	3,00	0,300	3,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,459
78	Depok	3,50	0,350	4,79	0,958	6,00	1,200	5,00	0,500	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,150	3,00	0,300	4,458
79	Metro	3,00	0,300	4,97	0,994	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	5,00	0,500	4,444
80	Gorontalo	4,00	0,400	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,440
81	Sibolga	4,00	0,400	5,20	1,040	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,440
82	Langsa	3,00	0,300	4,30	0,860	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	4,00	0,400	4,410
83	Sungai Penuh	4,00	0,400	5,02	1,004	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,404
84	Bima	3,83	0,383	5,10	1,020	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,150	4,00	0,400	4,403
85	Pagar Alam	3,33	0,333	4,99	0,998	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	3,00	0,450	3,00	0,200	4,00	0,400	4,381
86	Sabang	3,67	0,367	4,30	0,860	7,00	1,400	4,00	0,400	3,00	0,300	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	4,377
87	Ternate	5,00	0,500	4,85	0,970	5,00	1,000	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,370
88	Makassar	5,17	0,517	5,48	1,096	3,00	0,600	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	4,363
89	Bandar Lampung	3,17	0,317	5,45	1,090	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	3,00	0,450	3,00	0,200	4,00	0,400	4,357
90	Pekanbaru	3,50	0,350	4,85	0,970	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	4,320
91	Banda Aceh	3,50	0,350	3,76	0,752	5,00	1,000	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	4,202
92	Lhokseumawe	3,50	0,350	3,70	0,740	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,150	4,00	0,400	4,140
93	Cilegon	3,50	0,350	3,97	0,794	5,00	1,000	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	3,00	0,150	3,00	0,300	3,994
94	Pare Pare	4,33	0,433	5,06	1,012	3,00	0,600	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	3,945